

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

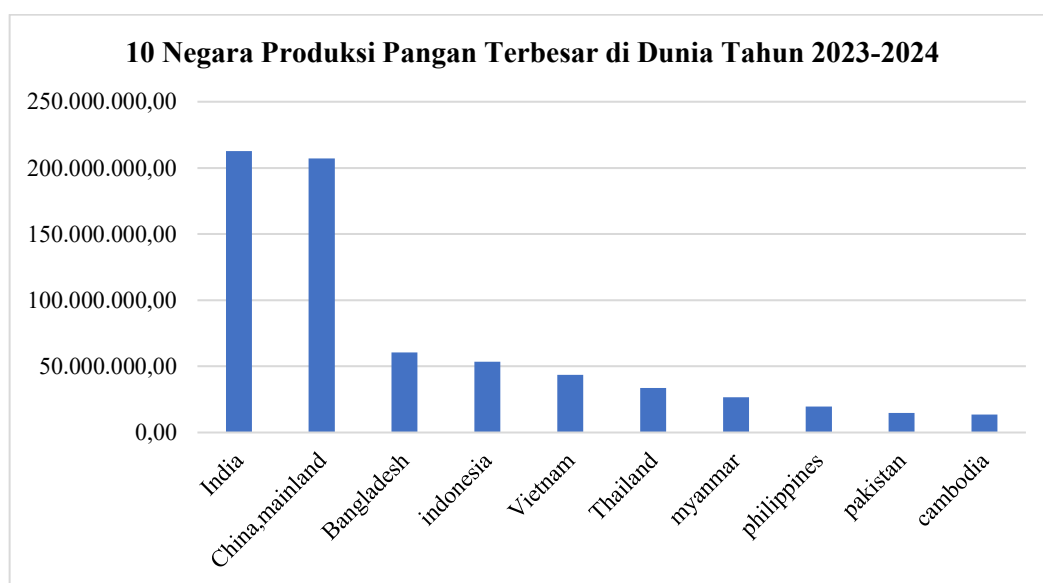
Ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan pembangunan paling mendesak di abad ke-21. Menurut Food and Agriculture Organization (1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika seluruh penduduk, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup aktif dan sehat . Namun realitas global jauh dari definisi tersebut. Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) mencatat sekitar 733 juta penduduk dunia mengalami kelaparan pada tahun 2023, sementara 2,33 miliar orang berada dalam kondisi kerawanan pangan moderat hingga parah. Angka ini setara dengan hampir satu dari sebelas orang di seluruh dunia, atau satu dari lima orang di Afrika (Food and Agriculture Organization, 2024). Kondisi ini memperlihatkan ketegangan fundamental antara kemampuan produksi dan ketercapaian ketahanan pangan secara multidimensi yang menunjukkan bahwa tren perbaikan ketahanan pangan global telah mengalami stagnasi yang serius.

Situasi ini semakin diperburuk oleh laporan Global Report on Food Crises (GRFC) 2025 yang dirilis World Food Programme (WFP) bersama mitra internasionalnya. Laporan tersebut mencatat lebih dari 295 juta orang di 53 negara mengalami kelaparan akut pada tahun 2024, meningkat sekitar 13,7 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya (WFP, 2025). Peningkatan ini dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu konflik bersenjata yang mengganggu rantai distribusi pangan, tekanan ekonomi berupa inflasi pangan yang tinggi di negara-negara berkembang,

serta cuaca ekstrem akibat perubahan iklim yang merusak kapasitas produksi pertanian secara langsung. Kondisi ini membuktikan bahwa ketahanan pangan bukan semata persoalan produksi, melainkan persoalan sistemik yang melibatkan dimensi ekonomi, politik, dan lingkungan secara simultan.

Persoalan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas produksi pangan dunia. Data FAOSTAT tahun 2023-2024 mencatat sepuluh negara dengan produksi pangan terbesar di dunia. Data ini penting dilihat lebih dahulu karena memperlihatkan peta persebaran kapasitas produksi pangan global sebelum dikaitkan dengan kondisi kawasan tertentu. Gambar 1.1 di bawah ini menyajikan data produksi pangan berupa serelia yaitu beras, jagung, gandum dan biji-bijian utama pangan oleh sepuluh negara produsen terbesar di dunia pada tahun 2023-2024.

Gambar 1. 1 10 Negara Produksi Pangan Terbesar di Dunia Tahun 2023-2024



Sumber: FAOSTAT (2026), (data diolah)

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa India menempati posisi pertama sebagai produsen pangan terbesar di dunia pada tahun 2023-2024 dengan total

produksi sebesar 213 juta ton, diikuti China di posisi kedua dengan produksi sebesar 207 juta ton. Kedua negara ini mencatat volume produksi yang jauh melampaui delapan negara lainnya dalam daftar. Bangladesh berada di posisi ketiga dengan produksi sebesar 61 juta ton, diikuti Indonesia sebesar 54 juta ton. Vietnam menempati posisi kelima dengan produksi 44 juta ton, sementara Thailand mencatat 33 juta ton. Myanmar, Filipina, Pakistan, dan Kamboja melengkapi daftar sepuluh besar dengan produksi masing-masing sebesar 26 juta ton, 19 juta ton, 14 juta ton, dan 13 juta ton (FAOSTAT, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa kapasitas produksi pangan dunia terkonsentrasi pada kawasan tertentu. Dari sepuluh negara produsen pangan terbesar di dunia, seluruhnya berasal dari kawasan Asia Pasifik, yaitu India, China, Bangladesh, Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina, Pakistan, dan Kamboja. Kondisi ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik memegang peran kunci dalam pasokan pangan dunia. Temuan ini sejalan dengan laporan FAO Regional Conference for Asia and the Pacific yang menyatakan bahwa kawasan Asia Pasifik menyumbang lebih dari 50 persen populasi dan produksi pangan dunia, sehingga menjadikan kawasan ini pusat utama stabilitas pangan global (FAO, 2026). Peran ini juga memperlihatkan karakteristik yang khas, karena sepuluh negara tersebut tergolong sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dominasi negara berkembang Asia Pasifik dalam produksi pangan dunia menegaskan posisi strategis kawasan ini, sekaligus menghadapi tekanan besar untuk menjaga ketahanan pangan bagi penduduknya sendiri.

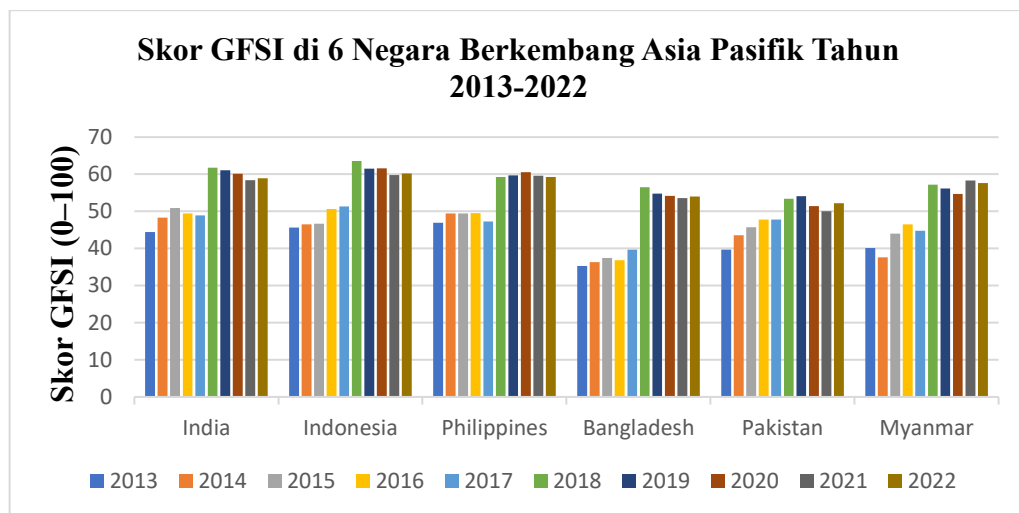
Dominasi negara berkembang Asia Pasifik dalam produksi pangan dunia belum tentu diikuti oleh ketahanan pangan yang baik bagi penduduknya. Produksi pangan hanya menggambarkan satu sisi dari ketahanan pangan, sehingga diperlukan instrumen pengukuran yang lebih menyeluruh untuk menilai kondisi tersebut secara komprehensif. Global Food Security Index (GFSI) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur ketahanan pangan suatu negara secara multidimensi. GFSI disusun oleh Economist Impact dan mengukur ketahanan pangan melalui empat pilar, yaitu keterjangkauan (*affordability*), ketersediaan (*availability*), kualitas dan keamanan (*quality and safety*), serta keberlanjutan (*sustainability and adaptation*). Keempat pilar ini disusun dari puluhan indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan kondisi ketahanan pangan suatu negara secara menyeluruh (Economist Impact, 2022). Indeks ini mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menyediakan pangan yang cukup, terjangkau, berkualitas, dan stabil bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan (Handayani et al., 2025).

Economist Impact (2022) mencatat skor rata-rata global GFSI sebesar 62,2 pada tahun 2022. Skor ini menjadi acuan untuk menilai posisi ketahanan pangan suatu negara dibandingkan dengan kondisi ketahanan pangan dunia secara keseluruhan. Berdasarkan acuan tersebut, enam negara berkembang di kawasan Asia Pasifik yang termasuk dalam sepuluh besar produsen pangan dunia, yaitu India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar, tercatat memiliki skor GFSI di bawah rata-rata global tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas produksi pangan yang tinggi dengan tingkat

ketahanan pangan yang masih berada di bawah standar dunia pada keenam negara tersebut.

Kesenjangan inilah yang mendasari pemilihan keenam negara sebagai objek dalam penelitian ini. Volume produksi pangan yang besar pada keenam negara tersebut ternyata tidak diikuti oleh tingkat ketahanan pangan yang setara dengan rata-rata dunia, sehingga perlu dikaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi capaian skor GFSI pada masing-masing negara. Gambar 1.2 di bawah ini menyajikan skor GFSI keenam negara tersebut selama periode 2013 hingga 2022.

Gambar 1. 2 Skor GFSI di 6 Negara Berkembang Asia Pasifik Tahun 2013-2022



Sumber: Economist Impact (2022) (data diolah)

Gambar 1.2 memperlihatkan bahwa skor GFSI keenam negara mengalami tren peningkatan sepanjang periode 2013 hingga 2022, meskipun dengan pola yang bervariasi antarnegara. India dan Indonesia mencatat skor tertinggi di antara keenam negara, dengan skor yang meningkat dari kisaran 44 hingga 46 pada tahun 2013 menjadi kisaran 58 hingga 60 pada tahun 2022. Filipina menunjukkan tren serupa, dengan skor meningkat dari sekitar 47 pada tahun 2013 menjadi sekitar 59 pada tahun 2022. Bangladesh dan Pakistan mencatat skor yang relatif lebih rendah

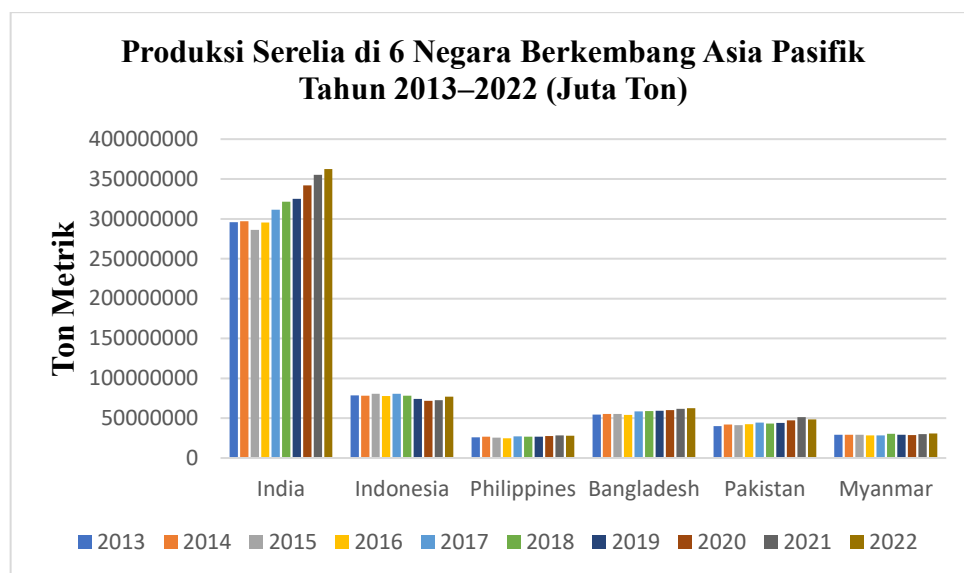
dibandingkan empat negara lainnya sepanjang periode pengamatan, meskipun keduanya tetap menunjukkan tren peningkatan menuju akhir periode. Myanmar mencatat skor terendah pada awal periode pengamatan, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mendekati skor negara-negara lain pada tahun 2022. Lonjakan skor pada tahun 2018 di seluruh negara turut terlihat jelas pada grafik, yang menandai adanya perubahan metodologi penilaian GFSI pada tahun tersebut (Economist Impact, 2022).

Penelitian ini menggunakan tiga dari empat pilar yang terdapat dalam GFSI, yaitu keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availability), serta keberlanjutan dan adaptasi (sustainability and adaptation). Pilar kualitas dan keamanan (quality and safety) tidak digunakan dalam penelitian ini karena indikatornya lebih menekankan aspek gizi dan keamanan pangan pada tingkat rumah tangga, yang berada di luar ruang lingkup penelitian ini. Pembatasan ini merupakan bagian dari keterbatasan penelitian, mengingat penelitian ini difokuskan pada tiga pilar yang secara langsung merepresentasikan dimensi ekonomi ketahanan pangan. Ketiga pilar yang digunakan diukur melalui proksi yang merepresentasikan karakteristik masing-masing pilar, yaitu belanja pemerintah sektor pertanian untuk pilar keterjangkauan, produksi pangan untuk pilar ketersediaan, serta produktivitas total faktor atau Total Factor Productivity (TFP) pertanian untuk pilar keberlanjutan dan adaptasi.

India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar sebagai negara-negara yang secara konsisten masuk dalam kelompok 10 besar produsen pangan dunia tersebut juga mencatat volume produksi sereal yang besar dan relatif stabil selama satu dekade pengamatan. Sereal merupakan komoditas

pangan pokok yang menyumbang proporsi terbesar dalam pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat di keenam negara tersebut, sehingga volume produksinya mencerminkan kapasitas sistem pangan domestik dalam menjamin ketersediaan pangan dasar bagi penduduknya. Gambar 1.2 di bawah ini menyajikan data produksi sereal India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar selama periode 2013 hingga 2022, melalui data tersebut dapat dilihat bahwa keenam negara mencatat kapasitas produksi yang besar meskipun dengan volume yang bervariasi antarnegara sepanjang periode pengamatan.

Gambar 1. 3 Produksi Sereal di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar Tahun 2013-2022



Sumber: World Bank (2026) (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa India mencatat produksi sereal tertinggi di antara keenam negara, meningkat konsisten dari 295,6 juta metrik ton pada 2013 menjadi 362,5 juta metrik ton pada 2022. Indonesia berada di posisi kedua dengan rata-rata produksi sekitar 76 juta metrik ton per tahun, meskipun mencatat tren yang stagnan sejak 2019. Bangladesh dan Pakistan masing-masing mencatat rata-rata produksi sekitar 58 juta dan 43 juta metrik ton per tahun, sementara Myanmar dan

Filipina mencatat volume produksi terendah dengan rata-rata masing-masing sekitar 29 juta dan 27 juta metrik ton per tahun. Allee et al., (2021) menemukan bahwa volume produksi sereal yang besar tidak secara otomatis menjadi prediktor kuat capaian ketahanan pangan, karena efisiensi penggunaan lahan dan kemampuan akses masyarakat terhadap pangan justru lebih menentukan variasi skor ketahanan pangan antarnegara.

Besarnya volume produksi sereal pada keenam negara tersebut ternyata tidak sejalan dengan capaian skor GFSI yang masih berada di bawah rata-rata global. Kesenjangan antara kapasitas produksi dan capaian ketahanan pangan ini menjadi titik tolak untuk menelaah faktor-faktor lain yang turut menentukan ketahanan pangan suatu negara.

Temuan tersebut memperkuat argumen yang dikemukakan oleh Sen (1981) dalam (Yadav Madhukar, 2022) bahwa kelaparan bukan semata akibat kekurangan produksi pangan, melainkan karena kegagalan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan atau yang dikenal sebagai *exchange entitlement failure*. Peningkatan produksi pangan yang tidak disertai oleh perbaikan akses, distribusi, dan daya beli masyarakat tidak akan secara otomatis meningkatkan ketahanan pangan. Kondisi ini mengarahkan perhatian pada dua faktor struktural lain yang turut menentukan capaian ketahanan pangan, yaitu kebijakan tarif impor produk pertanian dan produktivitas pertanian.

Data World Trade Organization (2026b) menunjukkan bahwa rata-rata tertimbang tarif impor produk pertanian di enam negara berkembang Asia Pasifik selama periode 2013–2022 berada pada kisaran sekitar 6 persen hingga lebih dari 15 persen dengan pola yang berfluktuasi. Perbedaan tingkat tarif tersebut

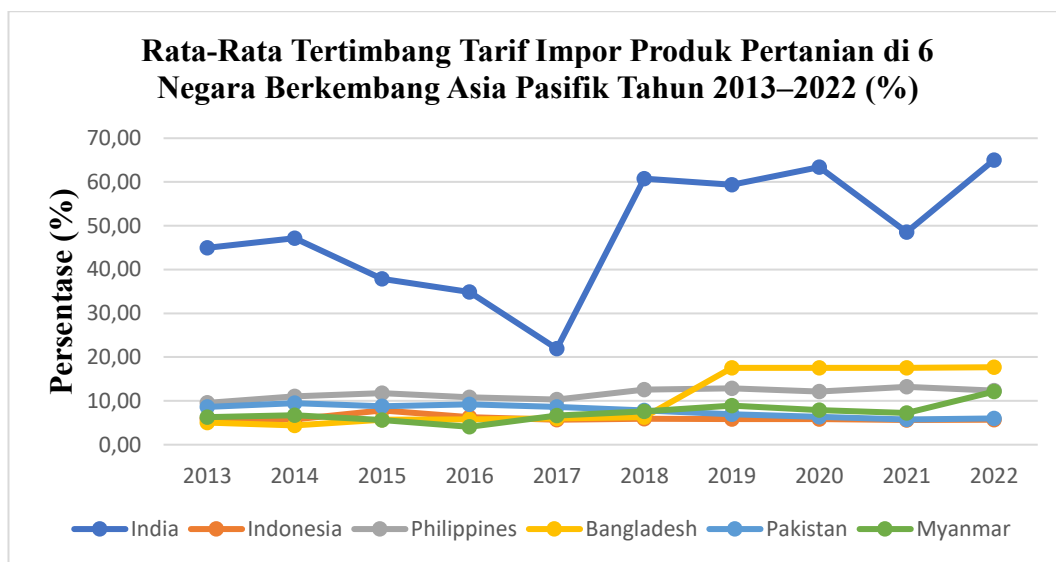
mencerminkan adanya variasi kebijakan perdagangan antarnegara dalam mengatur arus impor produk pertanian. Beberapa negara menerapkan tarif impor yang relatif rendah untuk memperluas akses terhadap pangan dari pasar internasional, sedangkan negara lainnya mempertahankan tarif yang lebih tinggi sebagai bentuk perlindungan terhadap sektor pertanian domestik.

Menurut Bachtiar et al. (2025), tarif impor memiliki peran ganda dalam sistem pangan suatu negara. Penerapan tarif yang tinggi dapat memberikan perlindungan bagi produsen domestik serta mendorong kemandirian pangan, tetapi berpotensi meningkatkan harga pangan di tingkat konsumen. Sebaliknya, tarif yang lebih rendah mampu memperluas ketersediaan pangan melalui impor, namun meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Fenomena tersebut juga terlihat di kawasan ASEAN. Beberapa negara, seperti Indonesia dan Filipina, masih mempertahankan kebijakan proteksi tarif untuk mendukung upaya swasembada pangan dan melindungi sektor pertanian domestik, sedangkan beberapa negara lainnya menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka guna menjamin ketersediaan pasokan pangan melalui impor (Sundram, 2023). Perbedaan arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tarif impor terhadap ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif yang diterapkan, tetapi juga oleh kondisi kelembagaan, kapasitas produksi domestik, serta kemampuan masing-masing negara dalam menjaga stabilitas sistem pangannya.

Gambar 1.4 di bawah ini menyajikan perkembangan rata-rata tertimbang tarif impor produk pertanian di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar selama periode 2013 hingga 2022. Data tersebut memperlihatkan

bahwa fluktuasi tarif impor terjadi hampir di seluruh negara tanpa pola yang seragam.

Gambar 1. 4 Rata-Rata Tertimbang Tarif Impor Produk Pertanian di di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar Tahun 2013-2022 (%)



Sumber: World Trade Organization (2026b) (data diolah)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan rata-rata tertimbang tarif impor produk pertanian di enam negara berkembang Asia Pasifik selama periode 2013–2022 memiliki pola yang berbeda pada masing-masing negara. India merupakan negara dengan tingkat tarif impor tertinggi sekaligus fluktuasi yang paling besar selama periode pengamatan. Tarif impor India tercatat sebesar 44,9 persen pada tahun 2013, kemudian menurun menjadi 22,0 persen pada tahun 2017, sebelum kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 64,7 persen pada tahun 2022 (World Trade Organization, 2026b).

Di sisi lain, Bangladesh dan Filipina menunjukkan tren kenaikan tarif impor yang lebih bertahap. Tarif impor Bangladesh meningkat dari sekitar 7 persen sebelum tahun 2019 menjadi 17,7 persen pada tahun 2022. Sementara itu, tarif

impor Filipina naik secara bertahap dari 9,3 persen pada tahun 2013 menjadi 13,0 persen pada tahun 2022. Myanmar juga mengalami peningkatan tarif impor, yaitu dari 4,3 persen pada tahun 2016 menjadi 12,5 persen pada tahun 2022 (World Trade Organization, 2026b).

Berbeda dengan ketiga negara tersebut, Indonesia dan Pakistan mempertahankan tingkat tarif impor yang relatif rendah dan cenderung stabil selama periode pengamatan. Tarif impor di kedua negara berada pada kisaran 5–8 persen tanpa mengalami perubahan yang signifikan (World Trade Organization, 2026b). Secara keseluruhan, Gambar 1.3 menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor produk pertanian di enam negara berkembang Asia Pasifik berkembang dengan arah yang berbeda-beda, sehingga mencerminkan adanya variasi strategi perdagangan yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Perbedaan perkembangan tarif impor antarnegara tersebut menunjukkan bahwa setiap negara menerapkan kebijakan perdagangan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan tujuan pembangunan sektor pertaniannya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nugroho et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) cenderung meningkatkan harga produsen pertanian, sedangkan keanggotaan dalam *World Trade Organization* (WTO) justru berkaitan dengan penurunan harga produsen. Sementara itu, Putaran Doha (*Doha Round*) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga produsen pertanian. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa dampak liberalisasi perdagangan terhadap sektor pertanian berbeda-beda pada setiap negara, bergantung pada skema perdagangan yang diterapkan dan karakteristik ekonomi masing-masing.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Luo dan Tanaka (2021), yang menemukan bahwa negara dengan tingkat ketergantungan impor pangan yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap gejolak harga di pasar internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan tarif impor yang rendah tidak selalu memberikan manfaat terhadap ketahanan pangan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi domestik. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan tarif impor dalam mendukung ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing negara dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan perdagangan dan penguatan sektor pertanian domestik.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tarif impor tidak hanya ditentukan oleh tinggi atau rendahnya tarif yang diterapkan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan konsistensi implementasi kebijakan tersebut. Tarif impor yang tinggi cenderung memperkuat dimensi ketersediaan pangan melalui perlindungan terhadap produksi domestik (Bachtiar et al., 2025). Namun, pada saat yang sama, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap dimensi akses pangan karena berpotensi meningkatkan harga pangan di tingkat konsumen. Dengan demikian, penerapan tarif impor yang tidak diarahkan pada komoditas strategis serta tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung, seperti peningkatan kapasitas produksi domestik dan penguatan daya beli masyarakat, berpotensi menghambat upaya peningkatan ketahanan pangan secara menyeluruh.

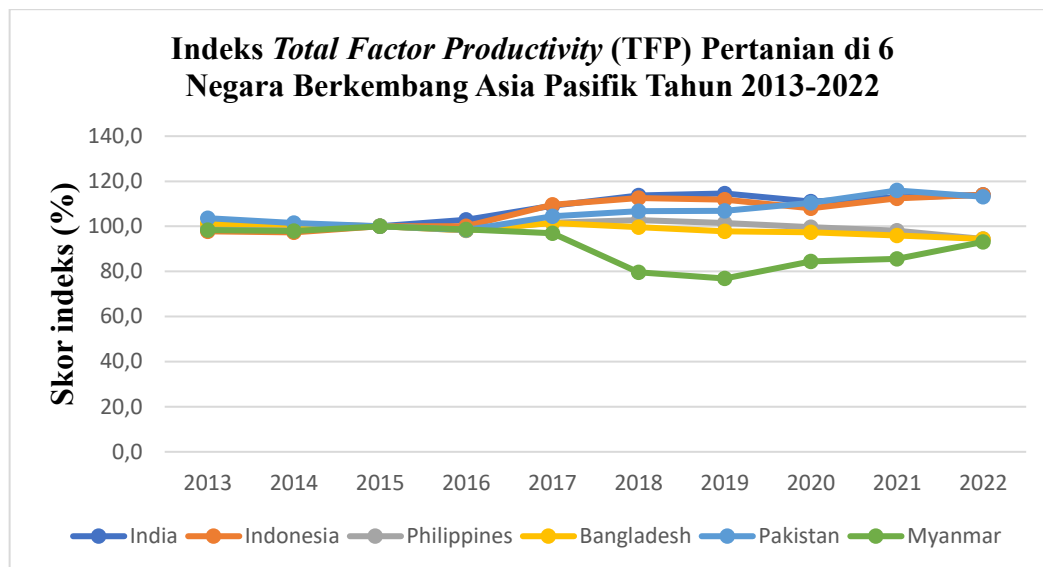
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor pertanian saja belum cukup untuk menjamin tercapainya ketahanan pangan yang optimal apabila tidak didukung oleh peningkatan efisiensi sistem produksi pertanian. Oleh karena itu, selain kebijakan perdagangan, produktivitas sektor pertanian juga menjadi

faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. TFP atau *Total Factor Productivity* mengukur efisiensi penggunaan seluruh faktor produksi secara bersamaan dalam menghasilkan output pertanian, sehingga pertumbuhan TFP yang konsisten mencerminkan kemampuan sistem pertanian dalam memproduksi lebih banyak tanpa menambah input secara proporsional (Wang et al., 2024). Solow (1956a) menegaskan bahwa kemajuan teknologi yang tercermin dalam TFP merupakan sumber utama pertumbuhan output jangka panjang. Namun data menunjukkan bahwa TFP pertanian di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar justru bergerak fluktuatif tanpa arah pertumbuhan yang konsisten selama periode 2013 hingga 2022.

Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa perkembangan TFP pertanian di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar selama periode 2013–2022 belum menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Nilai indeks TFP di masing-masing negara mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan beberapa di antaranya mencatat pertumbuhan negatif pada periode tertentu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi sektor pertanian di negara-negara tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga peningkatan kapasitas produksi belum dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Gambar 1.5 di bawah ini menyajikan perkembangan indeks TFP pertanian keenam negara tersebut, melalui data tersebut dapat dilihat bahwa hampir seluruh negara mengalami naik turun indeks TFP yang tajam, bahkan beberapa negara mencatat pertumbuhan TFP negatif pada tahun-tahun tertentu.

Gambar 1. 5 Indeks Total Factor Productivity (TFP) Pertanian di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar Tahun 2013-2022



Sumber: USDA Economic Research Service (2023), diolah

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa Bangladesh mengalami penurunan TFP yang konsisten sejak 2016 hingga mencatat titik terendah sekitar 78% pada 2019, yang mengindikasikan kemunduran efisiensi sistem pertanian secara structural (USDA Economic Research Service, 2023). Myanmar mencatat pola penurunan serupa, dengan TFP yang stabil di kisaran 100% hingga 2016, kemudian turun tajam ke level terendah pada 2019 akibat ketidakstabilan kebijakan dan gangguan konflik internal (WFP, 2025). India mempertahankan TFP di atas 100% sepanjang periode pengamatan dengan tren yang cenderung meningkat, sementara Indonesia mencatat kenaikan TFP pada 2017-2018 sebelum terkoreksi pada 2019. Secara agregat, USDA Economic Research Service (2023) mencatat perlambatan pertumbuhan TFP di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dari rata-rata 3,0 persen per tahun pada periode 2001-2010 menjadi hanya 1,1 persen pada periode 2011-2021.

Perlambatan dan fluktuasi TFP di keenam negara tersebut tidak hanya mencerminkan kemunduran kinerja sektor pertanian, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ketahanan pangan masyarakat. Kelompok masyarakat yang mengalami ketidakamanan pangan terbukti memiliki nilai output pertanian yang lebih rendah dibandingkan kelompok masyarakat yang aman pangan, sehingga produktivitas pertanian menjadi salah satu faktor penentu utama dalam membentuk kondisi ketahanan pangan. Rendahnya produktivitas yang disebabkan oleh keterbatasan sistem irigasi, perubahan iklim, serta minimnya akses terhadap input pertanian secara langsung memperparah kondisi kekurangan pangan yang dialami oleh masyarakat petani subsisten. Dengan demikian, perlambatan maupun fluktuasi produktivitas pertanian yang terjadi di suatu wilayah secara langsung melemahkan kemampuan sistem pertanian dalam mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan (Villacis et al., 2022). Namun, pengaruh produktivitas pertanian terhadap ketahanan pangan tidak dapat dipahami secara parsial tanpa mempertimbangkan interaksinya dengan kapasitas produksi pangan dan belanja pemerintah sektor pertanian secara simultan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan empiris yang perlu dikaji lebih lanjut dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Kajian-kajian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan, namun menunjukkan hasil yang bervariasi dan cenderung parsial tergantung pada variabel dan konteks wilayah yang diteliti. Penelitian oleh Mozumdar (2012) berjudul *"Agricultural Productivity and Food Security in the Developing World"* menemukan bahwa produktivitas pertanian yang lebih tinggi berkontribusi positif terhadap peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan

kemiskinan di negara berkembang, meskipun menegaskan perlunya strategi kebijakan terpadu yang tidak hanya berfokus pada peningkatan input produksi semata. Sementara itu, (Liu et al., 2020) dalam penelitiannya *"Agricultural Productivity Growth and Its Determinants in South and Southeast Asian Countries"* justru menemukan adanya penurunan produktivitas pertanian secara umum di kawasan Asia Selatan dan Tenggara, di mana teknologi dan human capital menjadi faktor penentu pertumbuhan TFP, sementara impor pertanian cenderung berdampak negatif terhadap produktivitas. (Fan et al., 2024) dalam penelitiannya *"Moving Towards Food Security in South Asian Region : Assessing the role of agricultural trade openness, production and employment"* menunjukkan bahwa produksi pertanian domestik dan tenaga kerja sektor pertanian berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan dalam jangka panjang, meskipun keterbukaan perdagangan pertanian justru menghambat capaian keamanan pangan akibat ketergantungan impor yang lebih besar dari manfaat ekspor.

Secara fenomena, terdapat paradoks yang konsisten di enam negara berkembang Asia Pasifik yang dikaji, di mana tingginya kapasitas produksi pangan yang tercermin dari dominasi kawasan Asia dalam produksi sereal global justru tidak sejalan dengan capaian Food Security Index yang masih berada di bawah rata-rata global sebesar 62,2 sepanjang periode 2013–2022 (Economist Impact, 2022). Di sisi lain, kebijakan tarif impor produk pertanian menunjukkan pola yang fluktuatif dan tidak konsisten pada periode yang sama, sementara pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) pertanian justru mengalami perlambatan signifikan, dari rata-rata 3,0 persen per tahun pada periode 2001–2010 menjadi hanya 1,1 persen pada periode 2011–2021 (USDA Economic Research Service, 2023).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingginya kapasitas produksi pangan tidak serta-merta diikuti oleh perbaikan ketahanan pangan apabila tidak didukung oleh kebijakan perdagangan dan efisiensi produksi yang memadai. Kajian terdahulu oleh Liu et al. (2020) dan Fan Lihong et al. (2024) telah menelaah sebagian faktor tersebut secara parsial, masing-masing berfokus pada determinan produktivitas pertanian di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara serta peran keterbukaan perdagangan pertanian terhadap ketahanan pangan di kawasan Asia Selatan, tanpa mempertimbangkan interaksi ketiga variabel tersebut secara simultan. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang menguji pengaruh produksi pangan, tarif impor produk pertanian, dan produktivitas pertanian secara simultan terhadap Food Security Index dalam satu kerangka data panel komparatif di kawasan Asia Pasifik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan secara simultan produksi pangan yang diukur melalui *cereal production*, kebijakan tarif impor produk pertanian yang diukur melalui rata-rata tertimbang tarif impor (*weighted average applied tariff*), dan produktivitas pertanian yang diukur melalui *Agricultural Total Factor Productivity Index* dalam satu kerangka analisis data panel komparatif guna menganalisis pengaruhnya terhadap indeks ketahanan pangan di enam negara berkembang Asia Pasifik, sesuatu yang belum dikaji secara simultan dalam satu model terintegrasi pada literatur sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada paradoks antara tingginya kapasitas produksi pangan dengan rendahnya capaian GFSI yang terjadi secara konsisten di kawasan Asia selama periode pengamatan 2013–2022, sehingga diharapkan mampu memberikan bukti

empiris yang lebih komprehensif terhadap dinamika ketahanan pangan di kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian penelitian terdahulu, penting untuk meneliti lebih lanjut pengaruh produksi pangan, tarif impor, dan produktivitas pertanian terhadap indeks ketahanan pangan secara mendalam, mengingat adanya kesenjangan empiris antara besarnya kapasitas produksi dan kebijakan tarif impor yang tidak konsisten dan perlambatan TFP di satu sisi, dengan rendahnya capaian GFSI yang terjadi secara bersamaan di enam negara berkembang Asia Pasifik sepanjang periode 2013–2022 di sisi lain. Selain itu, alasan peneliti memilih kajian ini juga untuk mengetahui sejauh mana ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi *Food Security Index* antarnegara di kawasan Asia Pasifik dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Atas dasar tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Produksi Pangan, Tarif Impor, dan Produktivitas Pertanian terhadap Indeks Ketahanan Pangan di Negara Berkembang Asia Pasifik".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah produksi pangan berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar?
2. Apakah tarif impor berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar?
3. Apakah produktivitas pertanian berpengaruh terhadap indeks ketahanan pangan di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diperoleh tujuan penelitian di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh produksi pangan terhadap indeks ketahanan pangan di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar.
2. Menganalisis pengaruh tarif impor terhadap indeks ketahanan pangan di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar.
3. Menganalisis pengaruh produktivitas pertanian terhadap indeks ketahanan pangan di India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina dan Myanmar.

1.4 Ruang Lingkup

- a. Objek Penelitian: Dalam penelitian ini, Indeks ketahanan pangan yang diukur melalui Global Food Security Index (GFSI) digunakan sebagai variabel dependen, sementara variabel independen yang dianalisis meliputi produksi pangan yang diukur melalui *cereal production*, tarif impor pertanian yang diukur melalui *MFN Trade-Weighted Average Applied Tariff on Agricultural Products*, dan produktivitas pertanian yang diukur melalui *Agricultural Total Factor Productivity Index*.
- b. Fokus Geografis: Penelitian berfokus pada enam negara berkembang di kawasan Asia Pasifik, yaitu India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Filipina, dan Myanmar. Keenam negara ini dipilih secara purposive berdasarkan kriteria sebagai produsen pangan utama di Asia, memiliki intervensi pemerintah sektor pertanian yang aktif, serta mencatat skor Food Security Index yang cenderung berada di bawah rata-rata global selama periode pengamatan.

- c. Periode Waktu: Penelitian ini menggunakan data tahunan pada periode 2013–2022, yang dipilih guna menggambarkan dinamika ketahanan pangan serta perkembangan produksi pangan, belanja pemerintah sektor pertanian, dan produktivitas pertanian di enam negara sampel selama satu dekade pengamatan.
- d. Pendekatan Analisis: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap indeks ketahanan pangan, baik secara parsial maupun simultan, serta mempertimbangkan variasi antar negara dan antar tahun dalam periode pengamatan.
- e. Sumber Data: Data sekunder diperoleh dari laporan resmi World Bank World Development Indicators untuk data produksi pangan, World Trade Organization (WTO) untuk data tarif impor, USDA Economic Research Service untuk data produktivitas pertanian, serta Economist Impact untuk data indeks ketahanan pangan.
- f. Batasan Penelitian: Penelitian ini tidak memperluas pembahasan pada dimensi ketahanan pangan mikro seperti status gizi individu maupun rumah tangga, serta tidak mencakup faktor-faktor lain di luar variabel yang telah ditetapkan seperti kondisi politik masing-masing negara maupun faktor sosial lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan variabel penelitian. Analisis terbatas pada pengaruh parsial dan simultan ketiga variabel independen terhadap indeks ketahanan pangan selama periode 2013–2022 untuk menjaga fokus penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pertanian dan ekonomi pembangunan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, dengan memberikan wawasan mengenai pengaruh produksi pangan, tarif impor, dan produktivitas pertanian terhadap Indeks Ketahanan Pangan di negara berkembang Asia Pasifik, sekaligus memperkaya kajian empiris terhadap ketahanan pangan pada konteks negara berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai faktor-faktor struktural yang memengaruhi capaian ketahanan pangan secara multidimensi, terutama dalam konteks paradoks antara besarnya kapasitas produksi dan rendahnya skor GFSI yang terjadi di kawasan Asia Pasifik, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara kebijakan perdagangan internasional dan ketahanan pangan di kawasan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah di negara-negara berkembang Asia Pasifik, khususnya kementerian yang membidangi pertanian, perdagangan, dan perencanaan pembangunan, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait peningkatan produksi pangan domestik, pengaturan tarif impor yang terukur, dan penguatan produktivitas pertanian sebagai instrumen penguatan ketahanan pangan nasional.

- b. Bagi Pelaku Sektor Pertanian: mengenai pentingnya peningkatan produktivitas pertanian sebagai faktor penentu daya saing produksi domestik, sekaligus pemahaman mengenai bagaimana kebijakan tarif impor dan volume produksi pangan nasional turut membentuk kondisi pasar yang mereka hadapi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyesuaikan strategi produksi dan pengelolaan usaha tani ke depan.
- c. Bagi Akademisi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk menganalisis dinamika ketahanan pangan di kawasan Asia Pasifik, khususnya mengenai peran TFP dan belanja pemerintah sektor pertanian dalam mendukung capaian ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- d. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai bagaimana produksi pangan domestik, kebijakan tarif impor, dan produktivitas pertanian saling berkaitan dalam menentukan harga dan ketersediaan pangan yang mereka hadapi sehari-hari, sehingga hasil penelitian ini pada akhirnya dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terjaminnya akses dan keterjangkauan pangan yang layak.